

BAB III

IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF COOPERATION* DALAM KERJASAMA

INDONESIA-JEPANG DI BIDANG KESEHATAN (2017-2021)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sudah sejauh mana implemenasi yang terjadi dari kerjasama antara Idonesia dan Jepang dibidang Kesehatan, dan juga akan membahas tentang bantua-bantuan apa saja yang diberikan Jepang kepada Indonesia.

3.1. Memorandum of Cooperation

Memorandum adalah suatu peringatan tidak resmi, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Memorandum juga merupakan suatu nota/surat peringatan tak resmi yang merupakan suatu bentuk komunikasi yang berisi antara lain mengenai saran, arahan dan penerangan. Sedangkan Cooperation merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan cara menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Misalnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengganti model kurikulum yang lama dengan menerapkan sistem kurikulum baru *Istilah memorandum of Cooperation* berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan Cooperation, yang dimana diartikan sebagai nota kesepahaman dalam pembentukan kerjasama, Yang dimaksud dengan Nota Kesepahaman adalah sebuah berkas yang ditanda tangani oleh satu negara dengan negara lain guna untuk menyetujui kerjasama yang dilakukan kedua negara.

Pada hakikatnya substansi dari *Memorandum of Cooperation* misalnya berisi suatu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan (hankam), keuangan, keahlian dan lainnya, dalam *Memorandum of Cooperation* juga dicantumkan tentang jangka waktunya, jangka waktu berlakunya *Memorandum*

of Cooperation adalah berkaitan dengan lamanya kerja sama itu dilakukan misalnya, jangka waktu tiga bulan, enam bulan, setahun, dan bahkan 5 tahun dan itu kembali kepada kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat menandatangani perjanjian tersebut, seperti yang dilakukan Indonesia dan Jepang kerjasama yang di sepakati dalam bidang kesehatan yang ditandatangani melalui *Memorandum of Cooperation* berjangka berlangsung selama 5 tahun yang dimulai pada 2017 dan akan berakhir pada 2021.

3.2. Implementasi MOC Indonesia-Jepang di Bidang Kesehatan

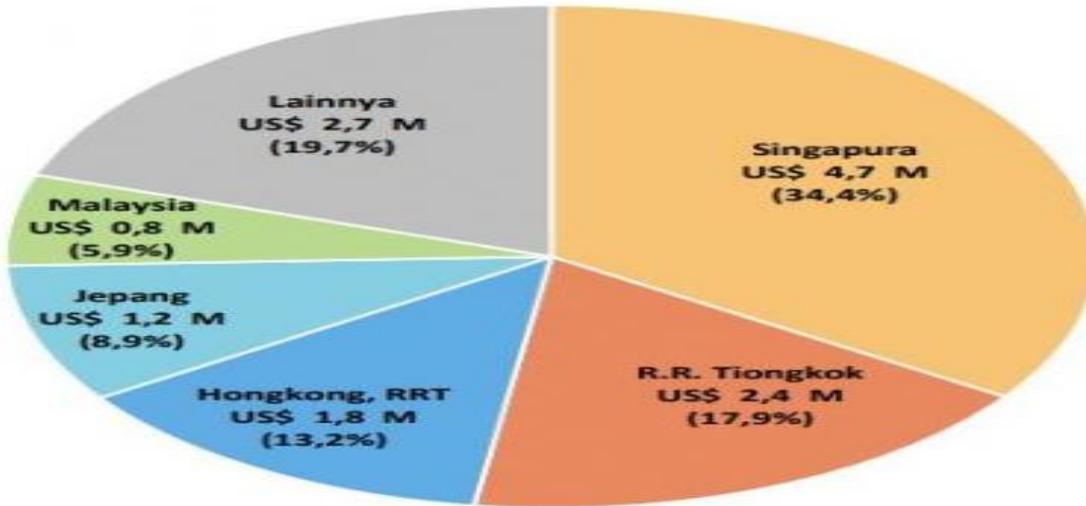
Kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang merupakan kerjasama yang disepakati oleh Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Jepang di bidang kesehatan, Kerjasama yang terjadi ini telah disepakati kedua belah pihak melalui penandatanganan *Memorandum of Cooperation (MoC)*¹. kerjasama yang terjadi dari kedua negara ini yang sudah berlangsung sejak 2017, kini kerjasama yang sudah terjalin cukup lama memiliki hasil dari upaya kerjasama yang mereka lakukan, walaupun dalam kerjasama ini Jepang tidak memiliki keuntungan yang besar seperti yang didapatkan oleh Indonesia, dari kerjasama yang terjadi ini Indonesia memiliki keuntungan yang cukup besar hal ini bisa kita lihat dari bantuan dana yang diberikan oleh pihak Jepang². Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Jepang dalam bidang kesehatan ini dapat meningkatkan kesehatan di Indonesia hal ini bisa kita lihat dari berbagai bidang kesehatan yang meningkat di Indonesia.

¹ Royom, Kesehatan menjadi Deliverable Penting Kunjungan Kenegaraan PM Jepang ke Indonesia.

[https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/tilis-media/20201019/5235454/kesehatan-menjadi-deliverable-penting-kunjungan-kenegaraan-pm-jepang-indonesia/\(diakses 19 Oktober 2020\)](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/tilis-media/20201019/5235454/kesehatan-menjadi-deliverable-penting-kunjungan-kenegaraan-pm-jepang-indonesia/(diakses%2019%20Oktober%202020))

² Fitri Syarifah, 7 Kesepakatan yang Dilakukan Indonesia dan Jepang di Bidang Kesehatan.

<https://www.liputan6.com/health/read/4387620/7-kesepakatan-yang-dilakukan-indonesia-dan-jepang-di-bidang-kesehatan> (Diakses 20 Okt 2020)



Gambar 3.1. Negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia di era Covid-19

Dalam kerjasama yang disepakati ini terdapat 7 bidang Area kerjasama dalam *Memorandum Of Cooperation* berikut 7 bidang kesehatan tersebut:

1. Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pelayanan Kesehatan
4. Teknologi Informasi Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Kesehatan Lingkungan

Dalam kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini merupakan kerjasama yang sudah terjadi sebelum Covid-19 dan setelah pandemi terjadi Indonesia mengalami penurunan ekonomi tidak hanya Indonesia saja tetapi hampir seluruh negara didunia merasakanya, Berbagai cara dilakukan setiap negara untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 ini salah satunya adalah dengan meningkatkan tingkat kesehatan di negara masing-masing bahkan menerapkan *lockdwan*, yang dimana masyarakat di tekankan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah dengan

begitu penyebaran Covid-19 akan menurun. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi pandemi, Sebenarnya diawal terjadinya pandemi negara-negara sangat terguncang dan sempat berhenti melakukan kerjasama dengan negara lain, alasannya tak lain adalah pandemi tetapi seiring waktu kerjasama yang terjadi mulai terjalin kembali, kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang lama terjalin ini mencoba untuk memberikan bantuan kepada negara Indonesia dalam mengatasi pandemi dan dengan hal itu Indonesia mencoba meningkatkan tingkat kesehatan di negaranya.

1.3. Tujuh Bidang Kerjasama Dalam MoC Sebelum Terjadinya Covid-19

Kerjasama yang antara Indonesia dan Jepang tidak hanya terjadi pada masa pandemi tetapi kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini sudah terjalin sebelum terjadinya Covid-19 atau yang sudah terjadi setelah penandatanganan *MOC*, ada 7 bidang kesehatan yang menjadi pusat utama dalam pengembangan kesehatan yang disepakati. Dengan 7 kesepakatan yang telah disepakati ini maka tingkat kesehatan di Indonesia akan meningkat terkhusus di bidang kesehatan, tetapi 7 bidang kesehatan ini tidak di hentikan meskipun Covid-19 terjadi. Berikut ini 7 bidang kerjasama dibidang kesehatan yang terjadi sebelum terjadinya Covid-19:

1.3.1. Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pemerintah menetapkan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai sektor-sektor strategis dalam penerapan revolusi industri 4.0 perkembangan farmasi dan alat kesehatan ini merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang harus terus berkembang guna untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi semua masyarakat³. seperti yang kita ketahui bahwa seiring perkembangan waktu maka semua hal juga harus berkembang begitu juga dengan farmasi dan alat kesehatan yang ada di neagara kita. Saat ini alat kesehatan teknologi menjadi kebutuhan bagi masyarakat

³ Pressrelease, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/industri-farmasi-dan-alat-kesehatan-dipacu-terapkan-industri-40?page=all> (Diakses 15 April 2021)

perkembangan farmasi dan alat kesehatan menuju industry 4.0⁴. Perkembangan farmasi dan alat kesehatan menuju industry 4.0 merupakan hasil dari kerjasama yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain salah satunya melakukan kerjasama dengan Jepang, Jepang adalah negara yang sudah memiliki tingkat kesehatan yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Kementerian kesehatan membagikan kebijakan percepatan implementasi industri 4.0 di sektor farmasi serta kimia dalam sesi talkshow “*Navigating the Journey of 4.0: Pharmaceutical and Chemical Industry*”⁵. Dalam Perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan mencakup langkah yang harus dilalui target perkembangan produk, serta jangka waktu. Target dari peta jalan tersebut adalah kemajuan industri untuk menghasilkan produk bahan baku yang berteknologi tinggi. Guna mewujudkan peta jalan tersebut, dibutuhkan sinergi antara stakeholders guna meningkatkan kapabilitas dari pabrik untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan pertumbuhan sarana produksi alat kesehatan yang terus meningkat⁶. Dari 193 perusahaan di 2015, telah mencapai 891 perusahaan pada 2021. Artinya dalam lima tahun terakhir, industri alat kesehatan dalam negeri tumbuh sebanyak 698 industri atau meningkat 361,66 persen.

PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia yang merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku obat dan bahan baku kosmetik, yang dalam operasionalnya tengah berupaya mengimplementasikan pemanfaatan revolusi industri 4.0. perusahaan tersebut telah mengimplementasikan industri 4.0 untuk konektivitas, Hal Ini dilakukan untuk mengintegrasikan dan mengonsolidasikan anak perusahaan Kimia Farma, sehingga keputusan strategis dapat lebih

⁴ Suci Sedyta Utami, Medco.id. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzZEE0b-revolusi-industri-farmasi-dan-alat-kesehatan-ri> (Diakses 15 April 2021)

⁵ Kementerian Priduksitrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/22478/Industri-Farmasi-dan-Alat-Kesehatan-Dipacu-Terapkan-Industri-4.0---> (Diakses 14 April 2021)

⁶ Kementerian Priduksitrian Republik Indonesia, <http://ikft.kemenperin.go.id/industri-farmasi-8/>

cepat ditetapkan, Bahkan konektivitas tersebut tidak hanya untuk Kimia Farma saja tetapi untuk semua holding farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut data Kementerian Kesehatan sampai 2021 terdapat 271 industri formulasi farmasi, 17 industri bahan baku farmasi, 132 industri obat tradisional, 18 industri ekstraksi hasil alam⁷. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun produk farmasi dan alat kesehatan di Indonesia telah diekspor ke beberapa negara seperti Belanda, Inggris, Polandia, Nigeria, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Dengan perkembangan Farmasi dan alat kesehatan ini yang dimana perkembangan yang terjadi merupakan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat nasional dan tentunya perkembangan ini tidak akan terwujud jika tidak adanya bantuan/pemasukan dana yang tinggi untuk meningkatkan industry farmasi ini menjadi industry 4.0 dan untuk mendapatkan dana tersebut Indonesia harus mencari mitra yang tepat, dan Jepang adalah yang paling tepat menjadi mitra untuk melakukan kerjasama tersebut.

1.3.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan, pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi⁸. Pada era ini perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi pada era sekarang, SDM dilihat bukan hanya sekedar sebagai aset utama tetapi aset yang bernilai dan dapat

⁷ <https://bdkbanjarmasin.kemendagri.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>

⁸ H.Abdul Hamid,S,Ag M.M.Pd. <https://bdkbanjarmasin.kemendagri.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm> (Diakses 9 Oktober 2020)

dilipatgandakan, dikembangkan dan juga bukan sebaliknya tidak sebagai liability melainkan perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi yang lebih mengemukakan. Kementerian Kesehatan RI melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan hasilnya telah terjadi, perbaikan baik sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas kesehatan dengan harapan mampu bersaing di era digital 4.0. Perbaikan itu dilakukan pada tataran SDM, pemerataan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)⁹. Hal itu diwujudkan dalam Program Indonesia Sehat, dalam perkembangan SDM pemerintah mendorong pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat terdapat 3 komponen yakni Mewujudkan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional¹⁰. Program tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Keluarga sehingga keluarga sehat dapat terwujud. Terkait dengan perbaikan SDM menteri kesehatan mengadakan Program Indonesia Sehat dan telah menunjukkan perbaikan seperti pada kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990 (SDKI,1990) menjadi 305 per 100.000 per kelahiran hidup (SUPAS, 2015)¹¹. Penurunan AKI dan AKB terjadi karena beberapa faktor, yakni hampir seluruh Puskesmas yaitu 9456 telah melaksanakan kelas ibu hamil, 96,1% ibu hamil pernah mendapatkan pelayanan antenatal sekali selama kehamilannya, 86% ibu hamil diperiksa sekali sewaktu trimester I, dan 74,1% ibu hamil diperiksa sesuai standar, serta persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan telah

⁹ Rokom, Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190312/4529704/kemenkes-dorong-pembangunan-sdm-era-4-0/> (Diakses 12 Maret 2020)

¹⁰ <https://www.kemkes.go.id/article/view/17070700004/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html>

¹¹ <file:///C:/Users/acer/Downloads/infodatin-ibu.pdf>

mencapai 86%. Tidak hanya itu Menkes juga menjelaskan saat ini status gizi masyarakat mengalami perbaikan, berdasarkan Riskesdas persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di tahun 2013 sebesar 24,2% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 17,3%. Persentase Balita stunting di tahun 2013 sebesar 37,2% dan menurun menjadi 30,8% di tahun 2018, upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi terutama stunting sudah mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Balita wasting (kurus dan sangat kurus) di tahun 2013 sebesar 12,1% dan turun menjadi 10,2% pada tahun 2018¹². Perbaikan juga dilaksanakan pada pengendalian penyakit menular seperti upaya pengendalian penyakit tuberculosis paru dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB pada tahun 2018 mencapai 86% dan terdapat 1.508.864 pasien telah diobati sejak 2015. Terkait perbaikan di bidang fasilitas kesehatan, dalam rangka pemerataan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Kemenkes telah melakukan upaya afirmatif melalui dana alokasi khusus yang dimana kementerian kesehatan melakukan upaya afirmatif dengan mengalokasikan dana alokasi khusus afirmasi bidang kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan¹³. Adapun pembangunan Puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan pada Tahun 2018 sebanyak 249 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal di 49 Kabupaten dibandingkan Pembangunan 110 Puskesmas Perbatasan di 48 Kab/Kota di Tahun 2017. Tahun ini, direncanakan pembangunan Puskesmas di daerah Perbatasan dan Tertinggal sebanyak 270 Puskesmas di 98 kabupaten/kota. Dengan perkembangan SDM didalam bidang kesehatan yang menjadikan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang ini berhasil, karna tujuan Indonesia dan Jepang adalah menciptakan

¹² Rokom, Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190312/4529704/kemenkes-dorong-pembangunan-sdm-era-4-0/> (Diakses 12 Maret 2019)

¹³ <https://www.kemkes.go.id/article/print/19031200002/kemenkes-dorong-pembangunan-sdm-era-4-0.html>

SDM kesehatan yang berkualitas yang dimana nanti akan dapat di pergunakan baik di Indonesia maupun di Jepang.

1.3.3. Pelayanan Kesehatan

Menteri Kesehatan Kesehatan mendapatkan alokasi pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp. 84.300.366.580.000 tidak hanya itu kementerian kesehatan juga mendapatkan anggaran untuk pos pemulihan ekonomi sebesar Rp. 25,40 triliun yang digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana dan prasarana dan penelitian dan pengembangan kesehatan serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk PBP/BU, anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 84,3 triliun ini diluar dari tambahan sekitar Rp 25,4 triliun untuk penyiapan vaksin dan untuk ketahanan kesehatan nasional, Menkes menjelaskan dari pagu tersebut, sumber dana terbesar berasal dari Rupiah Murni (RM) anggarannya sebesar 82,42% atau Rp 69.47 triliun digunakan untuk PBI sebesar 70,22% atau Rp 48,8 triliun, untuk gaji dan operasional sebesar 11% atau Rp. 7,3 triliun dan kegiatan tupoksi seperti pengadaan PMT, obat dan vaksin, penempatan Nusantara Sehat, surveilans, serta pelaksanaan program lainnya sebesar 19,27% atau Rp. 13,4 triliun¹⁴. Sementara itu, alokasi terbesar kedua yakni BLU sebesar 16,56% atau Rp. 13,96 triliun digunakan untuk peningkatan pelayanan RS dan Poltekkes, PLN sebesar 0.53% atau Rp450 miliar digunakan untuk pembangunan RS vertikal di Indonesia Timur serta PNBP sebesar 0,49% atau Rp409 miliar. Menkes juga menjabarkan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk penanganan enam masalah kesehatan di tahun 2021 yang kemudian disebut sebagai Program Nasional¹⁵. Adapun keenam kegiatan prioritas tersebut diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka

¹⁴ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200814/1434631/enam-isu-kesehatan-jadi-fokus-kemenkes-tahun-2021/>

¹⁵ Humas Indonesia, <https://humasindonesia.id/berita/kementerian-kesehatan-siapkan-program-untuk-dukung-visi-misi-presiden-388> (Diakses 19 Oktober 2020)

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pencegahan stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi.

penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta peningkatan sistem kesehatan nasional dengan dukungan anggaran tersebut semua orang berharap pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sehat akan dapat terwujud sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia karna dengan menciptakan layanan kesehatan yang tinggi maka masyarakat akan merasa nyaman dan tentunya merasa bahwa tingkat kesehatan di indonesia sudah berkembang, hal ini juga akan menjadikan masyarakat tetap melakukan pengobatan di Indonesia semakin masyarakat nyaman dan tetap akan melakukan pengobatan dalam negeri maka otomatis tingkat ekonomi kita juga akan meningkat.

1.3.4. Teknologi Informasi Kesehatan

Era teknologi informasi saat ini telah menyentuh berbagai bidang dan aspek kehidupan termasuk diantaranya bidang kesehatan, Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang telah mempergunakan perkembangan teknologi, baik yang bersifat klinis maupun non klinis. Ataupun teknologi informasi yang bersinggungan langsung dengan pasien maupun yang dipergunakan dalam sistem pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan¹⁶. Penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan ini diyakini dapat memberikan berbagai manfaat bagi provider pelayanan kesehatan, dengan dukungan teknologi tersebut manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah tersedianya informasi kesehatan pasien yang akurat dan komprehensif,

¹⁶ <http://mutupelayanankesehatan.net/22-editorial/2701-penerapan-teknologi-informasi-dalam-peningkatan-mutu-pelayanan-kesehatan>, (Diakses 19 Desember 2017)

sehingga provider dapat memberikan berbagai kemungkinan perawatan terbaik¹⁷. Penerapan teknologi informasi yang lengkap dan akurat dapat membantu dalam proses diagnosa meminimalkan medical error serta dapat menawarkan pelayanan kesehatan yang aman dengan biaya rendah, untuk memperkaya informasi dan pengetahuan terkait penggunaan teknologi informasi pada proses pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan mutunya, dengan adanya website mutu pelayanan kesehatan akan menyajikan berbagai artikel dan informasi terkait penggunaan teknologi tersebut di berbagai aspek pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan serta bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat dipergunakan sebagai sarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

1.3.5. Pelayanan Perawatan Lansia

Saat ini kita mulai memasuki periode aging population, dimana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) pada tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat dimana tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%)¹⁸. Ditataran global situasi ini tidak jauh berbeda bahkan mungkin lebih memprihatinkan seperti fenomena Kodokushi di Jepang, yaitu lansia yang meninggal membusuk dalam kesendirian dan kejadiannya cukup banyak sehingga telah menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Jepang situasi ini yang merupakan gambaran dari dampak terjadinya populasi yang menua yaitu makin besarnya proporsi lansia terhadap jumlah penduduk di suatu negara. Indonesia saat ini sudah menuju kepada kondisi populasi menua dengan persentase Lansia sebesar 9,7%

¹⁷ Kanal Pengetahuan, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/penerapan-teknologi-informasi-dalam-peningkatan-mutu-pelayanan-kesehatan/>

¹⁸ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2851/4/Chapter1.pdf.pdf>

sedangkan negara-negara maju sudah melebihi 10% bahkan Jepang sudah melebihi 30%. Menyikapi isu Ageing Population ini terdapat beberapa komitmen global antara lain: Resolution World Health Assembly (WHA) 69.3 tahun 2016, Regional Strategy for Healthy Ageing, dan Response to Aging Societies and Dementia¹⁹. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 penyakit yang terbanyak pada lansia adalah untuk penyakit tidak menular antara lain hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung dan stroke, dan penyakit menular antara lain seperti ISPA, diare, dan pneumonia. Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lansia di fasilitas kesehatan telah diterbitkan beberapa Permenkes yang mengatur pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan.

Selain itu Permenkes no. 25 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016-2019 memiliki 6 strateginya²⁰:

1. Memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan
3. Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia
5. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia
6. Meningkatkan peran serta Lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat

Konsep dasar pengembangan pelayanan atau program kesehatan lansia diharapkan lansia yang sehat tetap sehat dengan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, kognitif dan spiritual, melalui upaya

¹⁹ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/85b19b3349d908541291abd38604c22c.pdf>

²⁰ <https://www.kemkes.go.id/article/view/19070500004/indonesia-masuki-periode-aging-population.html>

promotif dan preventif, termasuk kegiatan pemberdayaan lansia pengembangan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia, pengembangan rumah sakit yang mempunyai pelayanan geriatri dengan tim terpadu pengembangan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia dan Penguatan keluarga sebagai caregiver berdasarkan data direktorat kesehatan keluarga sampai dengan tahun 2018, sudah terdapat sekitar 48,4% Puskesmas (4.835 Puskesmas dari 9.993 Puskesmas) yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang Santun Lansia dan sudah mempunyai 100.470 Posyandu Lansia. Selain itu, sudah terdapat 88 Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan geriatri dengan tim terpadu maka pada kesempatan ini mengajak semua pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Lansia, melalui pelayanan kesehatan yang santun lansia baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun rujukan, pemerintah maupun non pemerintah.

1.3.6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dalam era saat berbagai penyakit telah bermunculan ditengah masyarakat berbagai cara dan upaya dilakukan pemerintah guna untuk melindungi masyarakat dengan berbagai cara, apa lagi di era 4.0 terjadinya waba virus yang biasa disebut Covid-19 merupakan penyakit menular yang di mana penyakit ini merupakan kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat²¹. Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 pemerintah melakukan berbagai upaya guna untuk mencegah penyebaran penyakit ini seperti dilaksanakan penerapan protokol kesehatan, juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk dapat

²¹Inspektorat madiun kota,<https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/02/24/kep-dirjen-pencegahan-pengendalian-penyakit-no-hk-02-02-4-423-2021/> (Diakses 24 Februari 2021)

mengendalikan pandemi COVID-19 di masyarakat maka dibutuhkan kekebalan tubuh yang kuat serta mendukung produktifitas ekonomi dan sosial, pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas, dengan hal ini masyarakat diharapkan bisa terbebas dari virus Covid-19.

1.3.7. Kesehatan Lingkungan

kesehatan lingkungan memegang peran penting dalam penyebaran agen penyebab penyakit, baik yang diakibatkan oleh agen biologi, kimia, maupun fisika. Oleh sebab itu, penyediaan lingkungan yang sehat bagi penduduk dapat mendukung visi Pemerintah dalam menciptakan SDM Unggul faktor lingkungan memiliki peran 40% dalam pencapaian status kesehatan masyarakat, diikuti dengan 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor hereditas²². Peringatan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia merupakan upaya mengingatkan kita semua agar menyadari peran kesehatan lingkungan yang cukup besar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat sebagai salah satu faktor untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Menjaga Kesehatan Lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu, selain merupakan anugrah dari sang pencipta kepada hambaNya, Kesehatan Lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar penyakit karena kesehatan tidak ternilai harganya²³. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut dan ketika sakit kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga, tubuh yang sehat bisa didapatkan dari berolahraga secara teratur, mengkomsumsi makanan bergizi dan lingkungan yang sehat serta bersih.

²² Rokom, Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190221/3029520/derajat-kesehatan-40-dipengaruhi-lingkungan/> (Diakses 22 Febuari 2019)

²³ Izaz Ika Anjani, radar banyu wangi jawa.pos <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/05/01/258207/menjaga-kesehatan-lingkungan-dimulai-dari-diri-sendiri> (Diakses 8 Juli 2020)

Lingkungan yang sehat terkadang sering tidak kita perhatikan karena kesibukan dalam bekerja sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satu yang mengkhawatirkan adalah demam berdarah (DBD) karena dapat menyebabkan kematian.

Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran termasuk di dalamnya debu, sampah dan bau²⁴. Di Indonesia masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk dan sehat. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain:

1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat.
2. Lingkungan menjadi lebih sejuk.
3. Bebas dari polusi udara.
4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk di minum.
5. Lebih tenang dalam menjalankan aktifitas sehari hari.

Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan, maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri misalnya rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan

²⁴ Badan Kepegawaian Daerah, <http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/kesehatan-lingkungan> (Diakses 22 November 2018)

lingkungan karena hal itu harus ditanamkan sejak dini, di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih.

Dari kerjasama yang ditandatangani melalui *Memorandum of Cooperation* antara Indonesia dan Jepang yang mana dalam kerjasama ini terdapat 7 bidang kesehatan yang telah disebutkan di atas, perkembangan 7 bidang kesehatan yang ada di Indonesia ini mendapatkan peningkatan setiap tahunnya mulai perkembangan obat-obatan, pengembangan sumber daya manusia khusus di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang semakin membaik, perkembangan teknologi kesehatan yang semakin membaik dari tahun ketahun, pelayanan kesehatan lanjut usia yang dikembangkan, penanganan dalam mengatasi penyakit yang timbul hingga pada perkembangan lingkungan hidup masyarakat yang diperhatikan. Dalam perkembangan dari setiap bidang kesehatan ini merupakan tujuan utama oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesehatan di negerinya jika 7 bidang kesehatan ini meningkat maka tentunya kebutuhan kesehatan nasional di negara Indonesia akan terwujud dengan begitu kerjasama bilateral yang dijalin yang dijalin Indonesia dan Jepang tidak mengecewakan bagi negara Indonesia karena keinginan utama atau tujuan utama Indonesia menjadikan Jepang Mitra dalam pengembangan kesehatan negaranya adalah untuk dapat meningkatkan kesehatan di Indonesia.

1.4. Kerjasama Yang Terjadi Setelah Pandemi Covid-19

Pada masa terjadinya pandemi Covid-19 hampir seluruh negara mengalami dampak yang sama baik negara maju maupun negara berkembang, seluruh negara mengalami kelumpuhan perekonomian di negaranya. Segalah rencana yang duluh dibuat sebuah negara dalam meningkatkan perekonomian di negaranya harus di tunda duluh karna adanya pandemi yang memporak-porandakan sistem perekonomian tersebut, pada masa pandemi semua negara

memerlukan dana yang besar untuk bisa memulihkan perekonomian negara tersebut. Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Jepang dalam meningkatkan tingkat kesehatan di negaranya cukup mendapatkan hasil positif dari kerjasama tersebut karena negara Jepang memberikan bantuan Kepada Indonesia, Pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Jepang memberikan hibah Covid-19 kepada Pemerintah Indonesia²⁵. berikut bantuan dana ataupun bantuan Hibah yang diberikan Jepang kepada Indonesia antara lain :

- a. Hibah pengadaan mobile X-rays senilai 2 billion yen (Rp. 280 Milyar).
- b. Hibah 12.200 tablet Avigan kepada Badan Litbangkes Kemenkes RI untuk Uji Klinis di Indonesia.
- c. Hibah 200.000 Masker yang didonasikan oleh Jakarta Japan Club (JJC) bernilai Rp. 800 juta.

Bantuan yang diberikan Jepang ini merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan Indonesia, setelah terjadi Covid-19 Indonesia mengalami tingkat perekonomian yang sangat rendah hal ini terjadi karena tingkat kesehatan di negara Indonesia sangat rendah sehingga semua uang yang dimiliki negara diberikan untuk meningkatkan kesehatan di negaranya dengan melakukan berbagai upaya seperti mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksin guna untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sangat besar harapan pemerintah Indonesia dengan bantuan dana yang diberikan Jepang ini maka tingkat kesehatan di Indonesia akan meningkat juga.

²⁵Biro Komunikasi dan Pelayanan, Kemenkes Jalin Kerja Sama Jepang Bidang Kesehatan Tangani Covid-19.

<https://ppni-inna.org/index.php/public/information/news-detail/981>